

SKRIPSI

**PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YULLY NOVITA SARI

1310111233

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H

Efren Nova, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

**“PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KOTA PADANG”**

(Nama : Yully Novita Sari, Nomor BP : 1310111233, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 halaman,
2018)

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Anak saat ini sering sekali menjadi korban dari perbuatan tak manusiawi dan tak beradab ini. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setidaknya telah memberikan perhatian secara normatif terhadap anak korban kekerasan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa hal ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah untuk melindungi dan menanganinya. Secara lebih khusus PerDa Povinsi Sumatera Barat No.5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Perda tersebut Pemerintah Daerah telah menunjuk suatu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang untuk menyelenggarakan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Padang. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Padang 2). Apakah kendala-kendala yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota padang 3).Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya langsung berasal dari P2TP2A Kota Padang dan berupa data yang di dapat melalui wawancara dan informasi dari P2TP2A Kota Padang yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen yang ada di P2TP2A Kota Padang. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang di implementasikan dengan P2TP2A. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Padang dengan proses penyelesaian perkara yaitu: korban diidentifikasi, penanganan medis bagi korban yang mengalami luka-luka, proses rehabilitasi kesehatan, korban yang tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling dan pemulihan psikis diberikan layanan rehabilitasi sosial dari proses konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual serta pendampingan rujukan jika diperlukan, pemberian bantuan dan pendampingan hukum dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga selesai, dan terakhir pendampingan pemulangan atas keinginan dan persetujuan korban. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang yaitu: kualitas dan kuantitas pengelola , penganggaran dana serta sarana dan prasarana yang terbatas, dengan belum optimalnya perhatian kepala daerah. Solusi terhadap kendala yang dihadapi, ada beberapa strategi yang dilakukan P2TP2A Kota Padang yaitu: Mengoptimalkan kerjasama dan penguatan jejaring kemitraan terpadu yang melibatkan pemerintah, organisasi non pemerintah yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, korban, kekerasan seksual